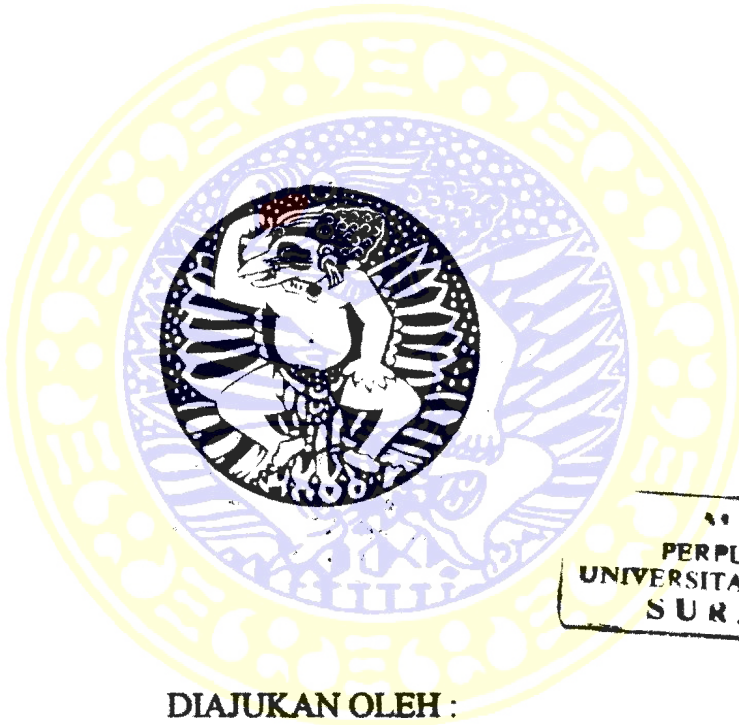


**PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PIUTANG YANG NYATA-  
NYATA TIDAK DAPAT DI TAGIH DALAM UPAYA UNTUK  
MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK  
DI PT BBI SURABAYA**

kk  
A 26  
Mad  
P

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



STIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**DIAJUKAN OLEH :**

**ROBBY SETIABUDI MADJID  
049711862/E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**SKRIPSI**

**PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PIUTANG YANG NYATA-  
NYATA TIDAK DAPAT DI TAGIH DALAM UPAYA UNTUK  
MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK  
DI PT X SURABAYA**

**DIAJUKAN OLEH :**

**ROBBY SETIABUDI MADJID**

**No. Pokok : 049711862/E**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

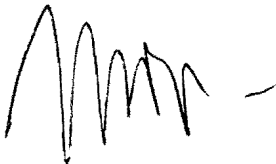
**DOSEN PEMBIMBING,**



**Drs. Ec. HERU TJARAKA, Msi, Ak**  
**NIP. 132.054.304**

**TANGGAL. 7-1-2003**

**KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**Drs. MOH. SUYUNUS, MAFIS, Ak**  
**NIP. 131.287.542**

**TANGGAL. 8-1-2003**

Surabaya, 25-11-2002

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



(Drs. Ec. Heru Tjaraka, Msi, Ak)

## ABSTRAK

Pemerintah sedang giat-giatnya untuk menjadikan sektor pajak sebagai unsur potensial penerimaan negara, hal ini dapat terlihat dengan disahkannya tiga undang-undang baru tentang perpajakan menggantikan undang-undang terdahulu yang dianggap belum berperan optimal dalam mengisi kas negara. Ternyata, salah satu dari ketiga undang-undang baru tersebut—yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan—relatif lebih banyak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Piutang merupakan salah satu bagian penting dari aktiva yang tertera pada neraca suatu perusahaan, namun pada kenyataannya jarang sekali ditemui perusahaan yang mampu menagih semua piutangnya pada debitur. Kadang kala jumlah piutang yang tidak dapat ditagih ini cukup material sehingga akhirnya menyebabkan penurunan keuntungan dalam tingkatan yang signifikan juga.

Faktor tersebut di atas inilah yang mendasari UU PPh tahun 2000 memasukkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai salah satu unsur yang mengurangi penghasilan bruto, sehingga mengakibatkan jumlah pajak penghasilannya berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah laba fiskal.

Pada tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2001 PT Boma Bisma Indra terbebani dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.017.701.800. Menurut perhitungan, jika dilakukan *tax avoidance* terhadap piutang macet (*bad debt*), maka perusahaan tersebut dapat menghemat sebesar 12,87% sehingga pajak penghasilan terutangnya menjadi Rp 886.675.600. Perusahaan disarankan untuk menggunakan fasilitas *tax avoidance* ini agar terhindar dari *opportunity cost* sebesar Rp 131.026.200 serta disarankan juga untuk melakukan perencanaan pajak pada sektor-sektor lainnya sehingga koreksi positif pada laba komersil dapat ditekan.

Kata kunci : Penghapusan piutang, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), penghematan pajak (*tax saving*).